



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP2KBP3A 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, Januari 2022

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JANNATULFALA, S.AP
NIP. 19640719 198503 2 005

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		vi
Daftar Lampiran		vii
Ikhtisar eksekutif		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A		2
1.3. Issu Strategis		10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		12
2.1 Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026		12
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021		14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		18
3.2. Realisasi Anggaran		63
BAB IV PENUTUP		75
LAMPIRAN		

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	10
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	13
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	14
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021 -----	15
Tabel 3.1	Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja -----	18
Tabel 3.2.	Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 --	19
Tabel 3.3.	Cascading Kinerja ISS-PD-1 Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	20
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi TFR tahun 2021 -----	22
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi TFR Tahun 2020 – 2021 -----	23
Tabel 3.6.	Target akhir TFR dalam renstra dan Realisasi 2021 -----	23
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi dengan Target Provinsi NTB -----	24
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional -----	24
Tabel 3.9.	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) -----	26
Tabel 3.10.	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2021 -----	26
Tabel 3.11.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) -----	27
Tabel 3.12.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) Tahun 2017 – 2021 -----	28
Tabel 3.13.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 -----	28
Tabel 3.14.	Efisiensi anggaran indikator TFR -----	29
Tabel 3.15.	Program/kegiatan yang menunjang indikator Angka Kelahiran Total (TFR) -----	30

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2021 -----	35
Tabel 3.17. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 – 2021 -----	35
Tabel 3.18. Target akhir Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dalam renstra dan realisasi tahun 2021 -----	36
Tabel 3.19. Data Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021 -----	37
Tabel 3.20. Efisiensi anggaran indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021 -----	38
Tabel 3.21. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021 -----	39
Tabel 3.22. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	42
Tabel 3.23. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 – 2021 -----	43
Tabel 3.24. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 – 2021 -----	43
Tabel 3.25. Efisiensi anggaran indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	44
Tabel 3.26. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	45
Tabel 3.27. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	49
Tabel 3.28. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tahun 2020 – 2021 -----	49
Tabel 3.29. Target akhir Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dan realisasi 2021 -----	50
Tabel 3.30. Efisiensi anggaran indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	51
Tabel 3.31. Program kegiatan yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	52

Tabel 3.32. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak -----	57
Tabel 3.33. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2020 – 2021 -----	57
Tabel 3.34. Target akhir Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dalam renstra dan realisasi 2021 -----	58
Tabel 3.35. Efisiensi anggaran indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak -----	59
Tabel 3.36. Program kegiatan penunjang Indikator Kabupaten Layak Anak -----	60
Tabel 3.37. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan DPPA) -----	63
Tabel 3.38. Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 (berdasarkan PK) -----	63

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	4
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	5

Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang IKU
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Berjenjang (Eselon III s/d Staf)
4. Rekap Capaian PK tahun 2021
5. Capaian PK tahun 2021 per Triwulan
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Rekap Capaian Kinerja RKT tahun 2021
8. Capaian Kinerja RKT Tahun 2021 per Triwulan
9. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021
10. Rekap capaian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021
11. Capaian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 per Triwulan
12. Matrik Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2021
13. Capaian Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021

IKhtisar Eksekutif

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Azas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang dijalankan, dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. lebih lanjut berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 mengisyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun.

LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021 ini menyajikan berbagai capaian kinerja sebagai kebutuhan untuk analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Capaian-capaian kinerja yang tergambar dari ukuran indikator-indikator kinerja sasaran sesungguhnya merupakan kinerja seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2021 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2021 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2021, selama periode ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan **81 Sub Kegiatan** dalam **26 Kegiatan** dan **10 Program** untuk memenuhi **5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis**. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp 15.400.876.068,00 meliputi Belanja Pegawai Rp. 6.200.422.669,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.142.251.531,00; Belanja Hibah 95.000.000,00 dan Belanja Modal Rp. 963.201.868,00.

Baik secara parsial dan simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan tolok ukur dan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dapat dikatakan berhasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Untuk memastikan keseluruhan program, dan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati, dan diturunkan secara

berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Sehingga Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

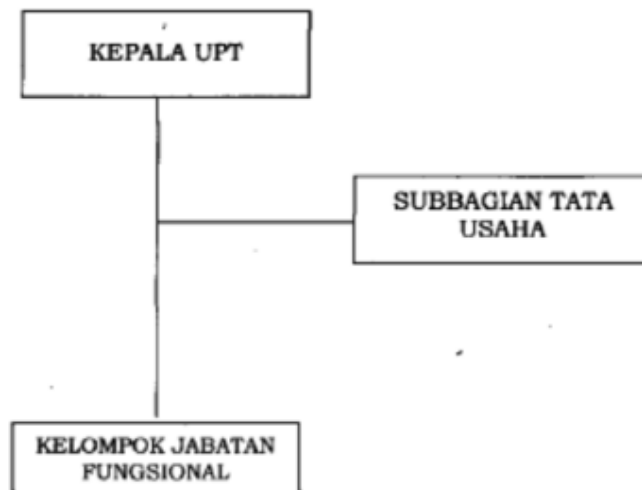
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Susunan Organisasi

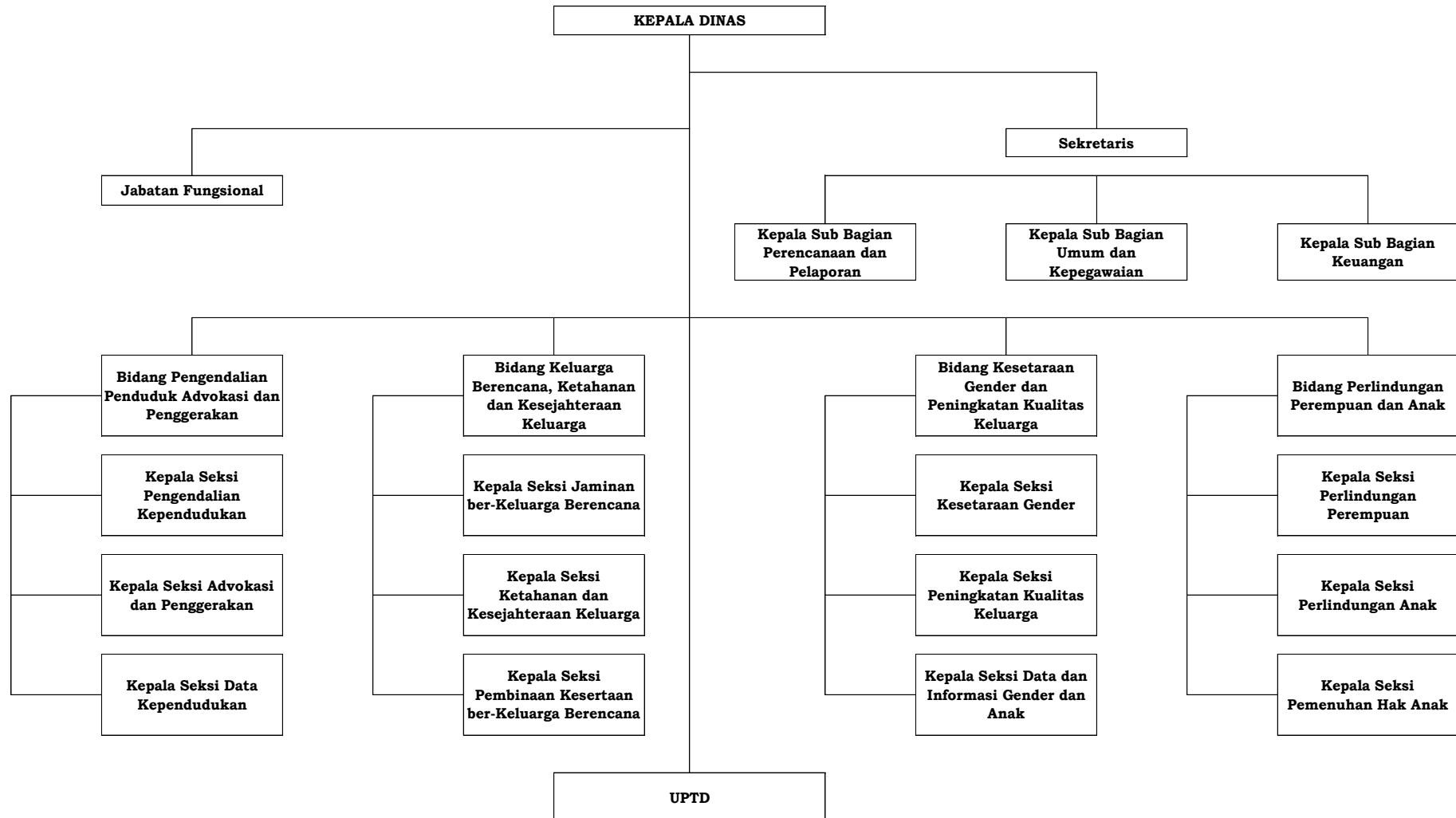
Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
 - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan terdiri atas :
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Seksi Data Kependudukan; dan
 - Seksi Pengendalian Kependudukan.
 - b. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - Seksi Jaminan ber-Keluarga Berencana;
 - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - Seksi Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - Seksi Kesetaraan Gender;
 - Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - Seksi Data, Informasi Gender dan Anak.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - Seksi Perlindungan Perempuan;
 - Seksi Perlindungan Anak; dan
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) terdiri atas:
 - Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT
pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
 2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
 3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
 4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
 5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak
 6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat	1. Kepadatan penduduk antar kecamatan belum proposional
2.	Keluarga Berencana	2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih kurangnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga melalui program KB
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3. Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Perlindungan perempuan dan anak	4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
5.	Kualitas keluarga,	5. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
6.	Perlindungan khusus anak	6. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak masih rendah

Tabel 1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung dua (2) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

2.1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, yang dilaksanakan melalui 4 Misi yaitu : (1) Sumbawa Sehat dan Cerdas dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, (2) Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dengan Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata, (3) Sumbawa Bersih dan Melayani dengan Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat

dan efisien, (4) Sumbawa Aman dan Berbudaya dengan Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

a. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan (AHH)
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A
			Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah

ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas perempuan dan anak dengan peningkatan layanan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Penguatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021

Untuk dapat mengukur kinerja sebuah organisasi perlu ditetapkan target kinerja organisasi yang akan digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.80
Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	85.00
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Kategori Nilai	BB
Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	8.19
Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	0.10

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan target pencapaian organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun pertama pencapaian Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama Tahun 2021-2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas P2BP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa bahwa terdapat 5 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- 1). Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator kinerja utama yaitu Angka Kelahiran Total (TFR),
- 2). Meningkatnya persentase keluarga sejahtera dengan indikator kinerja utama adalah Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera,
- 3). Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama yaitu Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A,
- 4). Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD, dan
- 5). Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dengan indikator kinerja utama adalah Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian sasaran strategis kinerja utama Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.80	1.99	128.93
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	85.00	92,15	108,41
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100%
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	8.19	94.48	1153.60
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	0.10	84.55	84549.36

Tabel 3.2. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 5 (tiga) indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Pada masing-masing indikator sasaran strategis perangkat daerah, akan di disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, kendala atau hambatan, serta dukungan dan upaya dilakukan terhadap tingkat ketercapaian setiap indikator sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun nomenklatur tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis serta program prioritas dan indikator outcome dari setiap program pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis pada Tahun 2021, Berikut disajikan cascading atas sasaran dan indikator sasaran sebagai PK dalam tabel dibawah ini dalam :

Tujuan (T)		Sasaran Strategis (SS)		Program (P)		Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)		PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					1	Peningkatan Indeks Kesehatan	Kepala Dinas
		1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)			1)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Kepala Dinas
				1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
						2	Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	3	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
						2	Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	Kepala Dinas
		2	Meningkatnya persentase keluarga sejahtera			2)	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Kepala Dinas
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
						3	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	Kepala Dinas
		3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			3)	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Kepala Dinas
				5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A	Sekretiat Dinas P2KBP3A
						4	Indeks Pembangunan Gender	Kepala Dinas
		4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah			4)	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Kepala Dinas
				6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan (T)		Sasaran Strategis (SS)		Program (P)		Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)		PD/Unit PD Pj.
						8	Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
				7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	9	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
						5	Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	Kepala Dinas
		5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak			5)	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Kepala Dinas
				9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	11	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	12	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.3. Cascading Kinerja ISS-PD-1 Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tabel di atas, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki 5 (lima) indikator sasaran strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”. Tujuan ini memiliki 5 (lima) indikator tujuan seperti yang tertuang dalam tabel diatas, berikut diuraikan masing-masing capaian indikator sasaran dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) ini masuk dalam Misi Pertama RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Sehat dan Cerdas, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Angka Kelahiran Total (TFR).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Angka Kelahiran Total (TFR) dihitung dengan formulasi:

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR$$

dimana:

TFR : Angka kelahiran total

ASFR_i : Angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur *i*

i = 1 : Kelompok umur 20-24 tahun, ..., dan *i*=7 untuk kelompok umur 45-49 tahun.

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR merupakan pengukuran sintetis yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor hipotetis perempuan. TFR dihitung dengan cara menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) kemudian dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun).

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021 adalah 1,99 %

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2021
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,80	1,99	128,93	Sangat Tinggi

Tabel 3.4. Target dan Realisasi TFR tahun 2021

Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,80%, maka dengan realisasi sebesar 1,99% menjadikan capaian indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021 menjadi 128,93%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Angka Kelahiran Total (TFR)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		2,19%		
Tahun 2021	2,80%	1,99%	128,93%	Sangat Tinggi

Tabel 3.5. Target dan Realisasi TFR Tahun 2020 – 2021

Sesuai dengan realisasi indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021, jika dibandingkan dengan Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2020 yang diketahui sebesar 2,19% dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 1,99%. Capaian nilai realisasi tersebut menggambarkan bahwa Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah berkinerja baik terhadap indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR).

e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,80	1,99	128,93%	2,76	1,99	138,69

Tabel 3.6. Target akhir TFR dalam renstra dan Realisasi 2021

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,76%, maka dengan realisasi sebesar 1,99% menjadikan capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 138,69%.

- f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) juga merupakan indikator kinerja pengendalian penduduk secara nasional, BKKBN Perwakilan NTB menargetkan TFR provinsi NTB pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,23%, sedangkan BKKBN menargetkan Angka Kelahiran Total (TFR) nasional sebesar 2,24% pada tahun 2021, Secara lengkap perbandingan capaian Kabupaten Sumbawa terhadap Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi NTB dan Nasional disajikan pada Tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kab. Sumbawa	Realisasi Kab. Sumbawa	Proporsi (%)	Target Provinsi NTB 2021	Realisasi Provinsi NTB 2021	Proporsi (%)
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,80	1,99	128,93	2.23	2.79	79%

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi dengan Target Provinsi NTB

No	Indikator Kinerja	Target Kab. Sumbawa	Realisasi Kab. Sumbawa	Proporsi (%)	Target Nasional 2021	Realisasi Nasional 2021	Proporsi (%)
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,80	1,99	128,93	2.24	2.24	100

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Sumbawa telah melewati Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi dan Nasional

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Secara umum pada kurun waktu tertentu angka fertilitas/kelahiran cenderung bersifat fluktuatif/berubah ubah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian angka kelahiran atau fertilitas, meskipun pemakaian kontrasepsi bukan satu-satunya faktor yang langsung berpengaruh, tetapi diyakini bahwa faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan fertilitas. Peningkatan pemakaian kontrasepsi dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap penurunan TFR. Selain itu, faktor sosial lainnya seperti tingkat pendidikan, migrasi dan lainnya yang berpengaruh terhadap TFR juga perlu menjadi perhatian.

Angka Kelahiran Total (TFR) yang disajikan diatas di dukung oleh tiga komponen penyusun indikator, dan ketiga komponen penyusun indikator tersebut semuanya terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8,96% untuk penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need), 81,98% untuk Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), dan 1,12% untuk Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk. Berikut diuraikan capaian dari ketiga komponen pendukung Angka Kelahiran Total (TFR).

1. Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai :

- ✓ Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin)
- ✓ Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan)

Berdasarkan data F1 DALAP, persentase realisasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Sumbawa jika dibandingkan dengan target yaitu mencapai 8,96 persen, angka ini telah melampaui dari target sebesar 15,20 persen atau sebesar 141.05 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	INGIN ANAK DITUNDA		TIDAK INGIN ANAK LAGI		JUMLAH Unmet Need	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Lunyuk	7,947	245	3.08	261	3.28	506	6.37
2	Alas	6,385	309	4.84	103	1.61	412	6.45
3	Utan	6,424	166	2.58	144	2.24	310	4.83
4	Batu Lanteh	2,152	121	5.62	105	4.88	226	10.50
5	Sumbawa	11,430	626	5.48	538	4.71	1,164	10.18
6	Moyo Hilir	4,710	199	4.23	211	4.48	410	8.70
7	Moyo Hulu	4,786	301	6.29	261	5.45	562	11.74
8	Ropang	1,025	34	3.32	20	1.95	54	5.27
9	Lape	4,508	303	6.72	305	6.77	608	13.49
10	Plampang	6,071	168	2.77	158	2.60	326	5.37
11	Empang	4,048	178	4.40	331	8.18	509	12.57
12	Alas Barat	4,175	302	7.23	243	5.82	545	13.05
13	Labuhan Badas	7,200	180	2.50	223	3.10	403	5.60
14	Labangka	2,836	241	8.50	160	5.64	401	14.14
15	Buer	1,942	245	12.62	261	13.44	506	26.06
16	Rhee	1,541	13	0.84	16	1.04	29	1.88
17	Unter Iwes	4,028	246	6.11	326	8.09	572	14.20
18	Moyo Utara	1,882	88	4.68	48	2.55	136	7.23
19	Maronge	1,907	120	6.29	129	6.76	249	13.06
20	Tarano	3,041	125	4.11	131	4.31	256	8.42
21	Lopok	5,049	163	3.23	119	2.36	282	5.59
22	Lenangguar	1,344	78	5.80	35	2.60	113	8.41
23	Orong Telu	1,422	19	1.34	21	1.48	40	2.81
24	Lantung	668	22	3.29	10	1.50	32	4.79
	Jumlah	96,521	4,492	4.65	4,159	4.31	8,651	8.96

Tabel 3.9. Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Berdasarkan data capaian 4 tahun ke belakang, persentase realisasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Perkembangan persentase realisasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada table berikut :

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,52	11,00	10,34	10,34	8,96

Tabel 3.10. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2021

2. Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri berstatus kawin, istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB

(Implant) dan kondom. Pengukuran CPR cara modern (persen) ini dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB modern dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Adapun realisasi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Kabupaten Sumbawa yaitu mencapai 81,98 persen, angka ini telah melampaui dari target sebesar 64 persen atau sebesar 128,09 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini.

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF	% Terhadap PUS
			IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL		
1	Lunyuk	7,947	632	110	-	65	3,800	1,991	392	6,990	87.96
2	Alas	6,385	565	1,198	8	32	1,050	1,855	120	4,828	75.61
3	Utan	6,424	1,849	150	-	14	1,660	1,741	201	5,615	87.41
4	Batu Lanteh	2,152	13	6	1	1	874	702	28	1,625	75.51
5	Sumbawa	11,430	3,749	380	20	100	2,503	2,074	487	9,313	81.48
6	Moyo Hilir	4,710	187	146	4	10	894	2,296	182	3,719	78.96
7	Moyo Hulu	4,786	714	130	9	21	1,538	1,109	233	3,754	78.44
8	Ropang	1,025	177	5	-	-	479	201	1	863	84.20
9	Lape	4,508	932	86	4	8	1,654	835	31	3,550	78.75
10	Plampang	6,071	1,109	166	32	14	1,717	2,095	261	5,394	88.85
11	Empang	4,048	505	144	2	22	934	1,260	62	2,929	72.36
12	Alas Barat	4,175	221	114	22	14	914	1,658	246	3,189	76.38
13	Labuhan Badas	7,200	1,175	136	4	48	2,336	2,786	82	6,567	91.21
14	Labangka	2,836	250	37	11	9	910	758	85	2,060	72.64
15	Buer	1,942	58	36	-	-	261	623	118	1,096	56.44
16	Rhee	1,541	94	29	1	4	374	829	132	1,463	94.94
17	Unter Iwes	4,028	522	71	3	63	797	1,262	313	3,031	75.25
18	Moyo Utara	1,882	250	160	1	3	675	456	60	1,605	85.28
19	Maronge	1,907	361	60	5	10	435	598	35	1,504	78.87
20	Tarano	3,041	141	82	3	6	977	1,174	65	2,448	80.50
21	Lopok	5,049	1,093	127	2	10	1,823	1,445	51	4,551	90.14
22	Lenangguar	1,344	127	29	-	28	463	413	61	1,121	83.41
23	Orong Telu	1,422	70	7	-	40	25	1,196	18	1,356	95.36
24	Lantung	668	32	20	63	-	252	182	6	555	83.08
JUMLAH		96,521	14,826	3,429	195	522	27,345	29,539	3,270	79,126	81.98

Tabel 3.11. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern di Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari angka 80,19 pada tahun 2020 menjadi 81,98 pada tahun 2021. Berikut disajikan capaian Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern dari tahun 2017 hingga 2021 seperti yang terlihat pada table berikut :

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)	79,80	79,07	80,28	80,19	81,98

Tabel 3.12. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) Tahun 2017 – 2021

3. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk

Fakta bahwa tren jumlah penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan sesuatu yang harus dikawal agar peningkatan tersebut tetap terkendali dan terencana sehingga mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik. jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 berjumlah 475.770

Dalam lima tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya penduduk Kabupaten Sumbawa meningkat sebanyak 5.540 jiwa atau sebesar 1,21 persen per tahun. Fakta lainnya yang terjadi yaitu bahwa pada lima tahun terakhir, angka peningkatan jumlah penduduk terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun masih dalam taraf terkendali.

Berikut disajikan data laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Sumbawa selama 5 (lima) tahun terakhir :

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penduduk (jiwa)	453.901	459.590	465.128	470.512	475.770
	Laju Pertumbuhan (%)	1,30	1,25	1,20	1,16	1,12

Tabel 3.13. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa mencapai 1,12 persen pada tahun 2021, angka tersebut telah melampaui target sebesar 56,57 persen dari target telah ditetapkan yaitu 1,98 persen. faktor yang mempengaruhi lajunya pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja. Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, metode (SOP), peralatan dan perlengkapan (machine), bahan baku (material) dan informasi tidak dianalisis secara khusus tetapi akan menjadi bagian langsung dalam uraian analisis.

Analisis atas efisiensi anggaran indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Angka Kelahiran Total (TFR)	1,99	5.396	5.396	5.309	5.162	97,23

Tabel 3.14. Efisiensi anggaran indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target indikator Angka Kelahiran Total (TFR) telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 1,99%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 97,23%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra

Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 95,66%. Maka diketahui bahwa indikator Angka Kelahiran Total (TFR) berkinerja sebesar 1,99% dengan menggunakan anggaran sebesar 97,23% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 95,66% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target indikator Angka Kelahiran Total (TFR) yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, diketahui bahwa indikator Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,80%, dan hasil pengukuran terhadap indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2021 juga tercapai sebesar 1,99%, sehingga berkinerja sebesar 128,93%. Pada Tahun 2021, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR). Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 tersebut diketahui ada terealisasi sesuai dengan target, ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang melebihi target, sebagai berikut:

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
1	Program Pengendalian Penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	≤1.98%	1,12%	143.43	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
1.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.1.2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data	1 Lap	1 Lap	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	
1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	-	
1.2.2	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen data Base Program KKBPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.2.4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.2.5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
1.2.6	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	-	-	-	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	≤15.20%	8.96%	141.05	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	100%	100%	
2.1.1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	1 buah	1 buah	100%	
2.1.2	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE yang tersedia	-	-		
2.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media massa cetak yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	1 media	1 media	100%	
2.1.4	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media elektronik yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	-	-		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
2.1.5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK	216 Orang	216 Orang	100%	
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penurunan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	≤72%	50,30%	130,14	
2.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapatkan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK	38 Orang	38 Orang	100%	
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK efektif yang ditetapkan Pemerintah Daerah	3 Pokja	3 Pokja	100%	
2.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4 Mitra	4 Mitra	100%	
2.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah PD yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB	10 PD	5 PD	50%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
2		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64.00%	81.98%	128,09	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	94%	100%	106,38	
2.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	156 Faskes	156 Faskes	100%	
2.3.2	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	-	-	-	
2.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	20 Unit	20 Unit	100%	
2.3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	17.137 Akseptor	17.137 Akseptor	100%	
2.3.5	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kelahiran oleh remaja (umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	511 kelahiran	637 kelahiran	124,66	
2.3.6	Peningkatan Kepesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	-	-	-	

Tabel 3.15. Program/kegiatan yang menunjang indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja program yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Namun terdapat target indikator kinerja sub kegiatan yang tidak tercapai. Berikut akan dijelaskan penyebab dari tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Indikator kinerja Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB. Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB, Penyebab tidak tercapainya target dari indikator pada sub kegiatan ini adalah anggaran dari perangkat daerah yang sebelumnya telah di petakan untuk intervensi di kampung KB, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, anggaran yang tadinya akan di peruntukan untuk intervensi di kampung KB harus di hapus atau dirasionalisasikan.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan surat edaran bupati Sumbawa tentang intervensi seluruh perangkat daerah kabupaten Sumbawa untuk pembangunan kampung KB

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran strategis meningkatnya persentase keluarga sejahtera ini masuk dalam Misi Kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Sejahtera dan Mandiri, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dihitung dengan formulasi:

Persentase Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}} \times 100$
--------------------------------------	---

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan. Kesejahteraan bukan perkara ekonomi saja, melainkan juga sosial, budaya, potensi wilayah, dan hal lainnya yang dapat mejadi faktor penentu kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan yang meliputi semua aspek tersebut sangat dibutuhkan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun 2021 adalah 92,15%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2021
Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	85,00	92,15	108,41	Sangat Tinggi

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2021

Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera memiliki target sebesar 85,00%, maka dengan realisasi sebesar 92,15% menjadikan capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2021 menjadi 108,41. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		82,19%		
Tahun 2021	85,00%	92,15%	108,41%	Sangat Tinggi

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 - 2021

Sesuai dengan realisasi indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2021, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2020 angka keluarga sejahtera diketahui sebesar 82,19% dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 92,15% Capaian nilai realisasi tersebut menggambarkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah berkinerja baik terhadap indikator Peningkatan Persentase Keluarga.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	85,00%	92,15%	108,41%	89%	92,15%	103,53%

Tabel 3.18. Target akhir Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dalam renstra dan realisasi tahun 2021

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera memiliki target sebesar 89%, maka dengan realisasi sebesar 92,15% menjadikan capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun 2021 berbading dengan target periode akhir Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 103,53%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2021 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera yang disajikan diatas di dukung oleh dua komponen penyusun indikator, yaitu Penurunan angka keluarga pra sejahtera dan Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga. Kedua indikator pendukung tersebut terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lengkap capaian dari indikator pendukung tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Penurunan angka keluarga pra sejahtera

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka keluarga pra sejahtera adalah dengan pelaksanaan KIE terkait KB/KR yang salah satu sub kegiatannya adalah pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan akses ekonomi keluarga yang berkualitas dan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB/KR yang mandiri melalui pemberdayaan institusi masyarakat Pedesaan (IMP).

Dengan adanya PPKS disetiap kecamatan dapat memberi dampak terhadap pencapaian indikator penurunan angka keluarga pra sejahtera, adapun data keluarga pra sejahtera pada tahun 2021 dari hasil pendataan keluarga yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		JUMLAH KK	PRA SEJAHTERA	% PRA SEJAHTERA	JUMLAH KK	PRA SEJAHTERA	% PRA SEJAHTERA
1	LUNYUK	5,874	1,521	25.89	5,199	474	9.12
2	ALAS	8,405	1,715	20.40	7,952	876	11.02
3	UTAN	9,216	1,562	16.95	9,260	855	9.23
4	BATULANTEH	2,957	2,081	70.38	2,444	201	8.22
5	SUMBAWA	15,161	2,549	16.81	12,436	567	4.56
6	MOYO HILIR	7,522	1,017	13.52	7,437	416	5.59
7	MOYO HULU	7,010	776	11.07	6,845	481	7.03
8	ROPANG	1,718	368	21.42	1,355	57	4.21
9	LAPE	5,036	417	8.28	4,339	256	5.90
10	PLAMPANG	8,761	537	6.13	7,874	591	7.51
11	EMPANG	6,885	1,509	21.92	6,874	405	5.89
12	ALAS BARAT	6,851	503	7.34	6,774	366	5.40
13	LAB. BADAS	8,543	800	9.36	6,938	728	10.49
14	LABANGKA	3,722	708	19.02	3,643	529	14.52
15	BUER	4,366	746	17.09	4,180	215	5.14
16	RHEE	2,149	389	18.10	2,080	122	5.87
17	UNTER IWES	5,955	784	13.17	5,759	308	5.35
18	MOYO UTARA	3,234	1,013	31.32	3,235	158	4.88
19	MARONGE	2,675	919	34.36	2,644	280	10.59
20	TARANO	4,894	1,820	37.19	4,847	483	9.96
21	ORONG TELU	5,527	357	6.46	5,514	746	13.53
22	LOPOK	2,475	692	27.96	2,491	277	11.12
23	LANTUNG	1,019	175	17.17	881	145	16.46
24	LENANGGUAR	1,054	371	35.20	1,052	45	4.28
JUMLAH		131.009	23.329	17,81	122.053	9.581	7,85

Tabel 3.19. Data Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terjadi penurun jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun 2020 sebesar 23.329 atau 17,81% menjadi 9.581 atau 7,85%

2. Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga

Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk tahun 2021 Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga difokuskan kepada pembentukan PUSPAGA.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Dari dua indikator pendukung tersebut disadari bahwa hanya memiliki peran yang sangat kecil dalam Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera, hal itu disadari karena peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi peran dari perangkat daerah lain seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan perangkat daerah yang program kegiatannya memiliki impact yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	92,15	1,570	1,570	1.551	1.435	92,52

Tabel 3.20. Efisiensi anggaran indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 92,15%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 92,52%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 91,37%. Maka diketahui bahwa Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera berkinerja sebesar 92,15% dengan menggunakan anggaran sebesar 92,52%, dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 91,37% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

- i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	≤17.01%	7.85%		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21	39.08		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	21 Unit	21 Unit	100	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola POKTAN yang dibina	-	-		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	1152 Kader	1152 Kader	100	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	5 Kelompok	5 Kelompok	100	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	96 Kelompok	96 Kelompok	100	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	9 Kelompok	9 Kelompok	100	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	20%	20%	100	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	1 indikator	1 indikator	100	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang melakukan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1 Mitra	1 Mitra	100	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE KG dan Perlindungan anak yang tersedia	3 buah	3 buah	100	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat	-	-		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1 lembaga	1 lembaga	100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUSPAGA yang terbentuk	1 lembaga	1 lembaga	100	

Tabel 3.21. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja program yang menunjang indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini menjelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing – masing program mempengaruhi capaian kinerja program.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja perangkat daerah ini masuk dalam Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Bersih dan melayani, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun

2021-2026, Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A dihitung berdasarkan hasil penilaian atau review yang dilakukan oleh APIP atau inspektorat kabupaten Sumbawa.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, serta Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Dengan evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang telah diamanatkan dalam RPJMD.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 adalah BB

c. Pembandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2021
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100	Sangat Tinggi

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A memiliki target BB, maka dengan realisasi BB menjadikan capaian indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 menjadi 100%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 berada

dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- d. Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		BB		
Tahun 2021	BB	BB	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.23. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 - 2021

Sesuai dengan realisasi Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A, jika dibandingkan dengan realisasi Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2020 yang diketahui adalah BB dan realisasi pada Tahun 2021 adalah BB. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tetap konsisten berkinerja baik terhadap Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada 2 (dua) tahun terakhir.

- e. Pembandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100%	A	BB	98,10

Tabel 3.24. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 - 2021

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A memiliki target A, maka dengan realisasi BB menjadikan capaian Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 98,10%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa maka capaian yang diperoleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam nilai kisaran 0 – 100 adalah sebesar 78,49 dan masuk dalam kategori nilai BB. Dengan demikian sasaran meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator kinerja peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki capaian 100 % dari target kategori BB dapat tercapai.

Dilihat dari nilai angka yang tercantum dalam target kinerja Program sebesar 78,49% juga dapat tercapai 100%. Nilai angka sebesar 78,49% ini naik 0,12 poin dari tahun 2020 sebesar 78,37%. Adapun upaya yang telah dilakukan sehingga capaian Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A dapat tercapai adalah dengan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	9.306	9.306	7.821	7.601	97,19

Tabel 3.25. Efisiensi anggaran indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja BB. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 97,19%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 81,68%. Maka diketahui bahwa Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A berkinerja BB dengan menggunakan anggaran sebesar 97,19% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 81,68% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai SAKIP DP2KBP3A	78.49	78.49	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	7 Dok	7 Dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	2 Lap	2 Lap	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4 Lap	4 Lap	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	7 dok	7 dok	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	3 Lap	3 Lap	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	350 Lap	365 Lap	104,28%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD yang disusun	1 Lap	1 Lap	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Lap	1 Lap	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Lap	1 Lap	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	3 Lap	3 Lap	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang disusun	1 Lap	1 Lap	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	4 Dok	4 Dok	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	8	8	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	48	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	5 Lap	5 Lap	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	10 Uni	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di kelola/ di tata	1187	2111	177,84%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	3 Rek	3 Rek	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas (Penyedia Jasa Layanan Kebersihan Kantor) yang difasilitasi	1 Orang	1 Orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	6 Unit	6 Unit	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	1 Unit	1 Unit	100%

Tabel 3.26. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja program dapat tercapai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja program.

4. Sasaran Strategis Meningkatkan Anggaran Responsif Gender di Daerah

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan anggaran responsif gender di daerah ini masuk dalam Misi Keempat RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumbawa Sumbawa Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2021 – 2026, Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dihitung dengan formulasi :

Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	X 100
	Jumlah seluruh belanja langsung APBD	

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2021 adalah 94,48%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2021
Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	8,19	94,48	1153,60	Sangat Tinggi

Tabel 3.27. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD memiliki target sebesar 8,19%, maka dengan realisasi sebesar 94,48% menjadikan capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2021 menjadi 1153,60%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Anak pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		7,72		
Tahun 2021	8,19	94,48	1153,60	Sangat Tinggi

Tabel 3.28. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tahun 2020 - 2021

Sesuai dengan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2021, jika dibandingkan dengan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2020 yang diketahui sebesar 7,72% dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar

94,48%. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berkinerja baik terhadap indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada 2 (dua) tahun terakhir.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	8,19	94,48	1153,60	14,00	94,48	674,86

Tabel 3.29. Target akhir Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dan realisasi 2021

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD memiliki target sebesar 14,00%, maka dengan realisasi sebesar 94,48% menjadikan capaian Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2021 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 674,86%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan ARG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan

ARG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011. Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 67 Tahun 2011 tersebut, dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah melakukan inisiasi tersusunnya ARG bagi program dan kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Pilot Project penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P2KBP3A. Sampai saat ini baru 29 Perangkat Daerah yang telah melakukan penyusunan GAP atau Gender Analysis Pathway dari 31 Perangkat Daerah yang telah dilakukan pelatihan dan pendampingan.

Tercapainya target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tidak lepas dari peran Driver PUG yaitu Bappeda, Inspektorat dan BPKAD, khususnya bappeda yang selalu mengawal dalam penyusunan GAB pada perangkat daerah. Selain itu sosialisasi dan pendampingan ulang terhadap Perangkat Daerah yang pernah dilatih.

Diakui sampai saat ini semua dokumen GAP yang telah disusun dan dikumpulkan belum dapat dilakukan analisis secara mendalam, namun dengan adanya dokumen GAP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah membuktikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	94,48	719	589	414	215	51,90

Tabel 3.30. Efisiensi anggaran indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 94,48%. Jumlah

capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 51,90%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 29,91%. Maka diketahui bahwa Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD berkinerja sebesar 94,48% dengan menggunakan anggaran sebesar 51,90% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 29,91% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan program kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD. Realisasi target kinerja dari program kegiatan tersebut mempengaruhi tingkat capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD, adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan persentase PD yang menerapkan ARG Melalui APBD	71.43%	94.48%	132,27%	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	40 OPD	40 OPD	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada PD yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	50 Buah	38 Buah	100	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	40 PD	40 PD	100	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	40 PD	40 PD	100	
		Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	0.9%	0.036%	4,00%	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	3 lembaga	100	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	90 Orang	90 Orang	100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 lembaga	1 lembaga	100	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana KIE yang tersedia	2 buah	2 buah	100	
	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	8.49%	9.18%	91,87%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	-		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Laporan	12 Laporan	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	12 Kasus	12 Kasus	100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 Lembaga	1 Lembaga	100	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	24 orang	24 orang	100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	100%	100%	100	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	2 Media	2 Media	100	

Tabel 3.31. Program kegiatan yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Bersarkan tabel diatas target program yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD ada yang tercapai da nada pula yang tidak tercapai, adapun program yang tidak tercapai targetnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada program ada dua indikator yaitu Peningkatan persentase PD yang menerapkan ARG Melalui APBD dan Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya, adapun indikator yang tidak tercapai adalah indikator kedua yaitu Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya dengan capaian sebesar 0,036 % dari target 0,9% atau sebesar 4,00%.

Penyebab tidak tercapainya target dari indikator tersebut adalah pengaruh dari pertumbuhan jumlah penduduk khususnya perempuan yang menjadi indikator perhitungan dari target.

2. Program Perlindungan Perempuan

Indikator dari program ini adalah Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani dengan capaian sebesar 9,18% dari target 8,49 atau sebesar 91,87%.

Penyebab tidak tercapainya target dari indikator ini adalah upaya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dinas masih dirasa kurang karena selain intensitas penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan sangat sedikit, juga disebabkan oleh masih kurangnya peran pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencegahan TKA dan TKP, misalnya peran desa dan kecamatan dalam melakukan upaya pencegahan belum ada.

Upaya yang dilakukan adalah melibatkan pihak desa dan kecamatan dalam pengawasan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan melalui pelimpahan kewenangan bupati kepada kecamatan. Sampai saat ini proses pengusulan pelimpahan kewenangan tersebut telah disampaikan kepada bagian pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya capaian indikator kabupaten layak anak ini masuk dalam Misi Keempat RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\text{Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak} \quad \text{Hasil Pengukuran KLA (T - n) - Hasil Pengukuran KLA (T - n)}}{\text{Hasil Pengukuran KLA (T - n)}} \times 100$$

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 adalah 84,55%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2021
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	0,10	84,55	84.549,36	Sangat Tinggi

Tabel 3.32. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memiliki target sebesar 0,10%, maka dengan realisasi sebesar 84,55% menjadikan capaian indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 menjadi 84.549,36%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020	32	32,09	100,29	Sangat Tinggi
Tahun 2021	0,10	84,55	84.549,36	Sangat Tinggi

Tabel 3.33. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2020 - 2021

Sesuai dengan realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021, jika dibandingkan dengan realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2020 yang diketahui sebesar 32,09% dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 84,55%. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten

Sumbawa tetap konsisten berkinerja baik terhadap Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada 2 (dua) tahun terakhir.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	0,10	84,55	84.549,36	6,65	84,55	1.271.42

Tabel 3.34. Target akhir Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dalam renstra dan realisasi 2021

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memiliki target sebesar 6,65%, maka dengan realisasi sebesar 84,55% menjadikan capaian Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 1.271,42%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada uraian sebelumnya capaian Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memang meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan, namun secara status Kabupaten Sumbawa belum masuk

kedalam kategori KLA. Hal itu di karenakan masih banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai status atau predikat KLA dari kementerian PPPA. Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan indikator KLA masih kurang
2. Belum maksimalnya pelibatan media massa dan elektronik dalam melakukan KIE pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan tindak kekerasan terhadap perempuan
3. Forum anak belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD
4. Terhadap indikator yang telah terpenuhi belum memenuhi standar seperti taman ramah anak yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan
5. Belum seluruhnya regulasi yang mendukung terwujudnya KLA dibentuk

Upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan dalam pemenuhan data dukung dari seluruh indikator yang telah terpenuhi, dan mengadvokasi dunia usaha untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	84,55	426	304	284	105	37,21

Tabel 3.35. Efisiensi anggaran indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 84,55%. Jumlah

capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 37,21%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 24,81%. Maka diketahui bahwa Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak berkinerja sebesar 84,55% dengan menggunakan anggaran sebesar 37,21% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 24,81% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	87,50%	60%	68,57%	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah	1 Forum Anak	1 Forum Anak	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kecamatan yang terbentuk	10 Forum Anak	10 Lembaga	100%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	10 orang	60 orang	600%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	4 Sekolah	4 Sekolah	100%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	2 buah	2 buah	100%	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	1 lembaga	1 lembaga	100%	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	0.037%	0.025%	125%	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	100%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Laporan	12 Laporan	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Unit PD Pj
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	

Tabel 3.36. Program kegiatan penunjang Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja program yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Namun terdapat juga target indikator program yang tidak tercapai yaitu Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA. penyebab tidak tercapainya target kinerja Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan indikator KLA masih kurang
2. Belum maksimalnya pelibatan media massa dan elektronik dalam melakukan KIE pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan tindak kekerasan terhadap perempuan
3. Forum anak belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD
4. Terhadap indikator yang telah terpenuhi belum memenuhi standar seperti taman ramah anak yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan
5. Belum seluruhnya regulasi yang mendukung terwujudnya KLA dibentuk

Upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan dalam pemenuhan data dukung dari seluruh indikator yang telah terpenuhi, dan mengadvokasi dunia usaha untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021, maka dapat disajikan jumlah pagu dan jumlah realisasi anggaran pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Uraian	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
		Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Belanja Daerah :	15.400.876.068	14.615.702.349	94,90
2.1	Belanja Operasi :	14.437.674.200	13.660.615.349	94,62
	Belanja Pegawai	6.200.422.669	6.076.329.305	98,00
	Belanja Barang Jasa	8.142.251.531	7.489.286.044	91,98
	Belanja Hibah	95.000.000	95.000.000	100,00
2.2	Belanja Modal	963.201.868	955.087.000	99,16
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	963.201.868	955.087.000	99,16
	Jumlah	15.400.876.068	14.615.702.349	94,90

Tabel 3.37. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Berdasarkan DPPA)

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	5,309,027,118	5,162,912,533	97.25
1.	Program Pengendalian Penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	965,697,892	887,933,677	91.95
1.1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	20,242,046	2,977,045	14.71
1.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	17,772,046	1,517,045	8.54

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data	2,470,000	1,460,000	59.11
1.2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	945,455,846	884,956,632	93.60
1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	#DIV/0!
1.2.2	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen data Base Program KKBPK	600,000	600,000	100.00
1.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan infomasi keluarga	4,417,736	3,713,335	84.06
1.2.4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga	466,929,300	464,041,800	99.38
1.2.5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	473,508,810	416,601,497	87.98
1.2.6	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	-	-	#DIV/0!
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	1,474,634,901	1,457,135,200	98.81
2.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	146,393,000	137,540,400	93.95
2.1.1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	58,652,200	50,730,000	86.49
2.1.2	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE yang tersedia	-	-	#DIV/0!
2.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media massa cetak yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	87,740,800	86,810,400	98.94
2.1.4	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media elektronik yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	-	-	#DIV/0!

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK		-	#DIV/0!
2.2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penurunan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	944,309,000	944,105,000	99.98
2.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapatkan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK	944,309,000	944,105,000	99.98
2.3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK efektif yang ditetapkan Pemerintah Daerah	383,932,901	375,489,800	97.80
2.3.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	756,901	756,900	100.00
2.3.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah PD yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB	383,176,000	374,732,900	97.80
		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2,868,694,326	2,817,843,656	98.23
2.4.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	2,868,694,326	2,817,843,656	98.23
2.4.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	302,036,907	259,076,402	85.78

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.4.2	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	1,187,822	587,820	49.49
2.4.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	1,472,241,172	1,469,751,010	99.83
2.4.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	107,018,250	102,418,250	95.70
2.4.5	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kelahiran oleh remaja (umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	14,483,000	14,483,000	100.00
2.4.6	Peningkatan Kepesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	971,727,175	971,527,174	99.98
	Meningkatnya persentase keluarga sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	1,551,014,204	1,435,054,212	92.52
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	1,514,827,839	1,399,087,847	92.36
3.1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1,514,827,839	1,399,087,847	92.36
3.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	349,198,992	341,649,000	97.84
3.1.2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola POKTAN yang dibina	-	-	#DIV/0!
3.1.3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	21,099,651	20,899,651	99.05

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.1.4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	87,000,000	11,800,000	13.56
3.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	457,132,196	457,012,196	99.97
3.1.6	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	600,397,000	567,727,000	94.56
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	36,186,365	35,966,365	99.39
4.1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	35,484,240	35,264,240	99.38
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang melakukan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	31,645,526	31,425,526	99.30
4.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE KG dan Perlindungan anak yang tersedia	3,838,714	3,838,714	100.00
4.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat	-	-	#DIV/0!
4.2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	702,125	702,125	100.00

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUSPAGA yang terbentuk	702,125	702,125	100.00
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	1,693,398,218	1,525,128,061	90.06
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai SAKIP DP2KBP3A	1,693,398,218	1,525,128,061	90.06
5.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	115,513,248	79,675,998	68.98
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4,147,160	4,147,160	100.00
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2,049,816	2,049,816	100.00
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1,916,760	1,916,760	100.00
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1,984,816	1,984,816	100.00
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	1,899,816	1,899,816	100.00
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	1,655,880	1,655,880	100.00
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	101,859,000	66,021,750	64.82
5.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	92,726,639	20,118,139	21.70
5.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	580,000	580,000	100.00
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	89,043,099	16,434,599	18.46
5.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD yang disusun	473,000	473,000	100.00

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	694,100	694,100	100.00
5.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	638,000	638,000	100.00
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	525,800	525,800	100.00
5.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang disusun	772,640	772,640	100.00
5.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	28,264,318	27,728,318	98.10
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1,383,318	1,383,318	100.00
5.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2,460,000	2,460,000	100.00
5.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	1,897,000	1,897,000	100.00
5.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	22,524,000	21,988,000	97.62
5.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	1,082,592,876	1,082,124,000	99.96
5.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,082,592,876	1,082,124,000	99.96
5.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	181,626,373	123,411,774	67.95
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di kelola/ di tata	14,208,153	14,008,153	98.59
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	148,692,000	90,777,401	61.05
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas (Penyedia Jasa Layanan Kebersihan Kantor) yang difasilitasi	18,726,220	18,626,220	99.47

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	192,674,764	192,069,832	99.69
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	2,936,700	2,723,700	92.75
5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	80,737,940	80,514,337	99.72
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	109,000,124	108,831,795	99.85
	Miningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	6,722,172	6,697,572	99.63
6.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan persentase PD yang menerapkan ARG Melalui APBD	6,722,172	6,697,572	99.63
6.1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	6,722,172	6,697,572	99.63
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan PUG	959,088	949,488	99.00
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada PD yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	719,180	711,180	98.89
6.1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	483,927	483,927	100.00
6.1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	4,559,977	4,552,977	99.85

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	28,803,808	27,770,824	96.41
6.2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	24,332,312	24,222,312	99.55
6.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24,332,312	24,222,312	99.55
6.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	4,471,496	3,548,512	79.36
6.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana KIE yang tersedia	4,471,496	3,548,512	79.36
7.	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	355,619,068	159,280,197	44.79
7.1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	62,249,007	54,502,507	87.56
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	62,249,007	54,502,507	87.56
7.2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	254,235,400	80,403,029	31.63

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	57,947,900	51,187,900	88.33
7.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	196,287,500	29,215,129	14.88
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	39,134,661	24,374,661	62.28
7.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	37,442,776	22,682,776	60.58
7.3.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1,691,885	1,691,885	100.00
8.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	23,822,237	21,622,599	90.77
8.1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	23,822,237	21,622,599	90.77
8.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	22,477,828	20,283,191	90.24
8.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	1,344,409	1,339,408	99.63
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	284,646,572	105,907,046	37.21
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	46,037,922	45,449,147	98.72
9.1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	36,071,873	35,483,098	98.37

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah	32,111,873	31,618,032	98.46
9.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kecamatan yang terbentuk	3,960,000	3,865,066	97.60
9.2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	9,966,049	9,966,049	100.00
9.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	6,025,000	6,025,000	100.00
9.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	-	-	#DIV/0!
9.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	3,183,312	3,183,312	100.00
9.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	757,737	757,737	100.00
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	238,608,650	60,457,899	25.34
10.1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3,583,150	3,260,150	90.99

Kode	SS-PD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,583,150	3,260,150	90.99
10.2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	198,157,500	35,609,749	17.97
10.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	130,000	130,000	100.00
10.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	198,027,500	35,479,749	17.92
10.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	36,868,000	21,588,000	58.55
10.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	36,868,000	21,588,000	58.55

Tabel 3.38. Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 (berdasarkan PK)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2021. Hasil pengukuran kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 masuk dalam kategori berhasil.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini dengan lebih gemilang yang berkeadaban.

LAMPIRAN :